

Implementasi Prinsip Organisasi Perkantoran dalam Mewujudkan Good Village Governance (Studi Kasus Desa Gunung Putri)

Riri Robiatul Adawiyah¹, Elsa Safitri², Fathan Ahmad³, Rendi Ramdhani⁴

¹ Universitas Djuanda, robiatular20@gmail.com

² Universitas Djuanda, elsafitriiii18@gmail.com

³ Universitas Djuanda, fathanarrasyid076@gmail.com

⁴ Universitas Djuanda, muhammad.rendi.ramdhani@unida.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip organisasi modern dalam mewujudkan Good Village Governance di Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Seiring dengan besarnya alokasi Dana Desa, diperlukan tata kelola yang akuntabel dan efisien untuk mencegah malpraktik administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur kepada Sekretaris Desa sebagai orang yang mengkoordinasikan tugas Kepala Desa. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, dan penarikan kesimpulan. Uji Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik, dengan menyamakan antara hasil wawancara dan dokumen tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Gunung Putri berhasil mengintegrasikan prinsip organisasi modern melalui struktur komando piramida yang tegas, penempatan SDM berbasis potensi, dan digitalisasi pelayanan publik melalui aplikasi website serta Anjungan Pelayanan Mandiri. Inovasi sistem "jemput bola" terbukti mampu memangkas birokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Meskipun terdapat kendala infrastruktur seperti gangguan listrik dan kapasitas SDM, penggunaan teknologi informasi dan penguatan unit usaha BUMDes (GunungPutriNet) berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) serta menciptakan transparansi anggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi kepemimpinan instruksional dan adaptasi teknologi informasi merupakan kunci utama dalam mencapai tata kelola desa yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Digitalisasi Desa, Good Village Governance, Pelayanan Publik, Prinsip Organisasi.

PENDAHULUAN

Pemerintah desa, sebagai garda terdepan dalam sistem birokrasi Indonesia, memegang tanggung jawab konstitusional untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, desa diwajibkan membangun tata kelola yang transparan, efisien, dan akuntabel. Saat ini, transformasi digital menjadi fenomena global yang mengubah standar pelayanan minimal melalui Sistem Informasi Desa (SID) untuk mempercepat birokrasi (Rachmad et al., 2025). Di tingkat lokal, Desa Gunung Putri muncul sebagai fenomena keberhasilan (*success story*) yang menarik perhatian melalui pola pelayanan proaktif "Jemput Bola", struktur organisasi yang lincah, serta kemandirian fiskal BUMDes yang mampu menghasilkan PAD hingga Rp30 Juta per bulan.

Namun, di balik narasi kemajuan tersebut, masih terdapat kesenjangan lebar (*gap analysis*) antara harapan (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*) pada banyak pemerintahan desa di Indonesia. Secara empiris, sebagaimana terlihat di Desa Medan Estate, tantangan besar masih mendominasi berupa buruknya akuntabilitas aparat, prosedur administrasi yang berbelit, keterlambatan penerbitan dokumen hukum (SK), hingga lemahnya koordinasi antarperangkat desa. Masalah utama dalam tata kelola desa sering kali berakar pada rendahnya profesionalisme sumber daya manusia dan defisit akuntabilitas yang menyebabkan pelayanan publik menjadi stagnan dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara teoritis, akuntabilitas dan transparansi merupakan determinan utama dalam menumbuhkan kepercayaan publik (Helida et al., 2025). Penelitian (Setiawati, 2019) menegaskan bahwa *Human Capital* dan profesionalisme memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi, di mana motivasi bertindak sebagai variabel antara yang menggerakkan kemampuan individu menjadi hasil kerja nyata. Lebih lanjut, (Pratolo, 2008) menekankan bahwa penerapan prinsip organisasi perkantoran yang modern dan transparan secara simultan akan meningkatkan kesejahteraan fiskal dan kualitas pelayanan publik. Literatur-literatur ini menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi sangat tergantung pada sejauh mana kualitas manusia mampu mengelola teknologi dan informasi secara rasional untuk mencapai sasaran strategis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan prinsip organisasi perkantoran dalam mewujudkan *Good Village Governance* di Desa Gunung Putri. *Novelty* atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengintegrasian konsep *Agile Governance* (tata kelola lincah) melalui praktik "Jemput Bola" dan digitalisasi administrasi sebagai solusi atas hambatan birokrasi konvensional di tingkat desa. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada aspek keuangan semata, kajian ini menggabungkan aspek profesionalisme SDM, efektivitas organisasi, dan akuntabilitas publik dalam satu kerangka analisis praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi panduan aplikatif bagi desa-desa lain di Indonesia untuk mereformasi sistem kerja menuju tata kelola pemerintahan desa yang berkelanjutan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara komprehensif implementasi prinsip organisasi modern dalam mewujudkan *Good Village Governance* di Desa Gunung Putri. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur kepada Sekretaris Desa Gunung Putri selaku informan kunci guna memperoleh informasi secara mendalam mengenai pola kepemimpinan, digitalisasi, dan tata kelola administrasi (Sidiq & Choiri, 2019), serta didukung dengan penggunaan kuesioner untuk memperkuat informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Subjek penelitian ini ditujukan kepada perangkat Desa Gunung Putri, dengan melibatkan 4 narasumber wawancara dan 6 responden kuesioner dari jajaran perangkat desa.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles & Huberman, di mana peneliti menyederhanakan data kompleks yang diperoleh terkait sistem pelayanan digital dan manajemen anggaran agar lebih mudah diolah, kemudian menyajikannya dalam bentuk naratif untuk memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang terjadi serta penarikan kesimpulan (Sidiq & Choiri, 2019). Untuk menjamin validitas

hasil, uji keabsahan data dilakukan menggunakan triangulasi teknik guna menguji kredibilitas data dengan cara mengecek informasi dari sumber yang sama melalui teknik yang berbeda, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan data dokumen terkait penerapan teknis di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Kesatuan Komando dan Struktur Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Gunung Putri, Bapak Muhammad Mustaqim dan pemeriksaan dokumen yang mendukung ditemukan bahwa transformasi tata kelola di Desa Gunung Putri sejak tahun 2019 bertumpu pada penguatan struktur dan digitalisasi. Implementasi prinsip organisasi perkantoran dilakukan secara sistematis melalui pembagian kerja yang jelas sesuai dengan regulasi pusat yang diatur dalam Permendagri 2018 tentang organisasi dan tata kementerian dalam negeri. Penempatan staf didasarkan pada analisis potensi, di mana perangkat desa ditempatkan sesuai dengan skill dan kompetensi yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan Teori Administrasi Henri Fayol yang menekankan pentingnya pembagian kerja (*division of work*) dan koordinasi sebagai fondasi manajemen organisasi (Fauzan, 2023).

Penerapan struktur piramida di Desa Gunung Putri mencerminkan prinsip organisasi perkantoran klasik, khususnya bentuk Struktur Lini atau Garis. Dalam model ini, kekuasaan mengalir langsung secara vertikal dari pimpinan kepada unit di bawahnya dengan rantai komando yang tegas. Kepemimpinan yang instruksional (instruksi tegas dari puncak kepemimpinan) diadopsi untuk memastikan disiplin perangkat desa dalam mengelola anggaran dan aturan. Secara teoretis, pola kepemimpinan yang cenderung sentralistik ini merupakan manifestasi dari sistem yang efisien dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Utami, 2017), sistem yang bersifat otoriter-instruksional sering kali dipilih oleh organisasi untuk menawarkan jalan yang cepat dalam proses pengambilan keputusan politik dan administratif, terutama dalam mencapai target pembangunan yang masif.

Disiplin yang diterapkan melalui instruksi tegas ini selaras dengan teori Fayol bahwa kepatuhan terhadap aturan organisasi adalah kunci efektivitas. Ketegasan dalam penerapan sanksi, seperti ancaman tidak mendapatkan Dana Desa jika tidak mengikuti aturan, merupakan implementasi dari strategi pengendalian organisasi. Hal ini berkaitan dengan

Teori Sumber Daya (Resource Dependence Theory) yang menyatakan bahwa organisasi sangat bergantung pada sumber daya eksternal (dalam hal ini Dana Desa sebesar Rp6 Miliar) untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, sehingga kepatuhan terhadap aturan pemberi sumber daya menjadi harga mati yang harus dijaga melalui kesatuan komando (Fauzan, 2023)

Meskipun struktur yang digunakan bersifat formal dan kaku, Desa Gunung Putri mengimbangnya dengan prinsip Formalisasi. Setiap rincian tugas dan tanggung jawab (Tupoksi) diatur secara jelas dalam dokumen resmi desa. Formalisasi memastikan setiap pegawai mengetahui dengan pasti apa yang harus dikerjakan, kapan, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Dampaknya, ketegasan instruksi dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak menimbulkan miskomunikasi, melainkan menciptakan kepastian hukum dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

Digitalisasi Administrasi dan Efisiensi Pelayanan

Organisasi perkantoran modern menuntut adanya otomasi untuk mencapai efisiensi yang terukur. Desa Gunung Putri mewujudkan hal ini melalui pengalihan arsip fisik ke sistem digital dengan kapasitas penyimpanan server hingga 7200 GB. Langkah ini sejalan dengan konsep E-Government yang bertujuan mengoptimalkan pelayanan publik agar lebih cepat, mudah, dan terbuka (Prisanda & Febrina, 2019). Transformasi ini secara langsung memecahkan masalah klasik birokrasi desa yang sebelumnya terlalu bergantung pada kehadiran fisik pimpinan untuk persetujuan dokumen. Sebagaimana dijelaskan oleh (Yulanda & Adnan, 2023), digitalisasi memungkinkan masyarakat melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor pelayanan secara fisik.

Transformasi digital di Desa Gunung Putri bukan sekadar alat bantu, melainkan strategi inti untuk mencapai efisiensi yang menurut Dahl (2018) merupakan poin utama dalam skala nilai administrasi. Namun, ketergantungan pada sistem digital memunculkan risiko kerentanan infrastruktur. Desa Gunung Putri memitigasi risiko ini melalui pengadaan genset dan laptop bagi perangkat desa. Langkah ini sangat relevan dengan temuan (Kardina et al., 2024) bahwa keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan fasilitas penunjang (perangkat keras) guna menghindari hambatan administratif secara daring.

Keberhasilan implementasi digital ini didorong oleh tiga elemen sukses utama menurut teori Harvard JFK School of Government dalam (Prisanda & Febrina, 2019), 1) Support

(Dukungan), adanya political will dari Kepala Desa Gunung Putri untuk melakukan pembaharuan sistem. 2) Capacity (Kapasitas), penguatan server dan pengategorian staf menjadi "kelompok berbakat" untuk mengoperasikan TI agar hasil yang dicapai optimal. 3) Value (Nilai), inovasi sistem "Jemput Bola" memberikan nilai manfaat nyata dengan memangkas hierarki birokrasi di tingkat RT/RW.

Dalam aspek pelayanan, Desa Gunung Putri mengalihkan paradigma dari konvensional menjadi digital melalui aplikasi berbasis website dan Anjungan Pelayanan Mandiri. Praktik proaktif mendatangi warga untuk pengurusan dokumen (seperti SKTM dan Akta Kematian) mencerminkan "mentalitas melayani" yang fleksibel dan dialogis (Kardina et al., 2024). Efektivitas sistem digital ini pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas layanan yang menurut (Ramdhani & Kholik, 2025) merupakan faktor krusial dalam menentukan kepuasan pengguna. Dengan transparansi data yang terintegrasi, Desa Gunung Putri tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mewujudkan Good Village Governance, di mana setiap pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan secara akurat dan akuntabel.

Akuntabilitas dan Transparansi dalam Tata Kelola

Good Village Governance mensyaratkan adanya akuntabilitas yang tinggi, di mana setiap tindakan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Desa Gunung Putri menunjukkan bahwa akuntabilitas dicapai melalui sistem pelaporan yang ketat dan transparan. Penggunaan papan pengumuman, media sosial, dan website sebagai kanal informasi menunjukkan adanya keterbukaan informasi publik yang nyata. Praktik ini sejalan dengan temuan (Ngakil & Kaukab, 2020) yang menekankan bahwa transparansi keuangan desa harus didukung oleh kemudahan akses melalui berbagai media informasi agar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, kemandirian ekonomi melalui BUMDes yang mengelola unit usaha telekomunikasi (GunungPutriNet) menunjukkan bahwa prinsip organisasi yang berorientasi pada hasil dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp10–30 Juta per bulan. Hal ini membuktikan bahwa tata kelola yang baik berdampak langsung pada kesejahteraan fiskal desa, sebagaimana ditegaskan oleh (Pratolo, 2008) bahwa transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah dan perwujudan keadilan bagi warga.

Dari sisi keuangan, desa mengelola anggaran yang signifikan dengan Dana Desa mencapai Rp6 Miliar, dengan penekanan pada tertib administrasi LPJ yang terdokumentasi secara bertahap mulai dari 0%, 50%, hingga 100%. Kedisiplinan administratif ini menjadi kunci keberhasilan Desa Gunung Putri dalam menghindari hambatan umum yang ditemukan dalam penelitian (Goo & Sanda, 2022), yakni keterlambatan pelaporan akibat kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam menerapkan peraturan secara maksimal. Dengan pengelolaan yang akuntabel, Desa Gunung Putri berhasil membuktikan bahwa efektivitas tata kelola tidak hanya meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga menciptakan kepercayaan publik yang lebih kuat. Keberhasilan ini membawa Desa Gunung Putri menjadi Juara 1 Lomba Desa di Kabupaten Bogor dan menjadikannya rujukan benchmarking bagi desa-desa lainnya di Indonesia dalam mengoptimalkan potensi desa melalui tata kelola yang transparan dan mandiri.

Human Capital dan Profesionalisme Kerja

Pembangunan sumber daya manusia di Desa Gunung Putri merupakan implementasi nyata dari konsep Human Capital yang menempatkan manusia sebagai penggerak, pemikir, dan perencana strategis organisasi. Pengembangan staf di desa ini menekankan pada aspek profesionalisme yang melampaui sekat latar belakang pendidikan formal. Hal ini selaras dengan temuan (Setiawati, 2019) yang menyatakan bahwa Human Capital dan profesionalisme memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dalam konteks Gunung Putri, profesionalisme diterjemahkan sebagai kemampuan adaptasi yang cepat dan komitmen untuk mewujudkan kualitas kerja yang tinggi tanpa hambatan birokrasi.

Keberhasilan Desa Gunung Putri dalam menanamkan prinsip sense of crisis menciptakan sebuah budaya kerja yang responsif. Secara teoretis, (Setiawati, 2019) menjelaskan bahwa motivasi berperan sebagai variabel intervening yang sangat kuat; artinya, kemampuan (Human Capital) dan keahlian (Profesionalisme) hanya akan mencapai kinerja puncak jika didorong oleh motivasi yang tepat. Pola pelayanan "Jemput Bola" di Desa Gunung Putri adalah bentuk konkret dari tingginya motivasi kerja tersebut. Perangkat desa tidak lagi hanya menunggu di belakang meja, tetapi bergerak aktif memenuhi standar efektivitas yakni ketepatan waktu dan efisiensi yang menjadi indikator utama kinerja.

Jika dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi instansi lain, seperti penurunan tingkat kehadiran yang dialami Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat pada

semester pertama 2021 (turun dari 98,90% ke 96,45%), Desa Gunung Putri justru menunjukkan tren sebaliknya dengan performa yang stabil. Penurunan kinerja di tempat lain sering kali disebabkan oleh kurangnya persepsi dukungan organisasi dan lemahnya motivasi kerja. Desa Gunung Putri mengatasi potensi masalah tersebut dengan memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengoptimalkan skill, waktu, dan tenaganya secara profesional. Keberhasilan organisasi sangat tergantung pada sejauh mana kualitas manusia sebagai penentu jalannya manajemen. Dengan mengintegrasikan nilai profesionalisme ke dalam setiap layanan publik, Desa Gunung Putri membuktikan bahwa keterbatasan pendidikan awal dapat ditutup dengan pelatihan berkala dan budaya kerja yang berorientasi pada solusi (pelayanan "Jemput Bola"), yang pada akhirnya menciptakan keunggulan kompetitif bagi desa tersebut.

KESIMPULAN

Keberhasilan Desa Gunung Putri dalam mewujudkan Good Village Governance merupakan buah dari integrasi yang solid antara transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan human capital yang progresif. Secara administratif, desa ini telah melampaui standar formal dengan menerapkan sistem pelaporan bertahap yang mampu memitigasi risiko defisit akuntabilitas, sebuah kendala yang sering kali menghambat kinerja desa pada umumnya. Kemandirian fiskal yang dicapai melalui optimalisasi BUMDes juga membuktikan bahwa ketika sebuah organisasi dikelola secara profesional dan berorientasi pada hasil, ia mampu menciptakan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Dari sisi sumber daya manusia, transformasi budaya kerja melalui prinsip sense of crisis dan pola pelayanan "Jemput Bola" menunjukkan bahwa motivasi kerja adalah kunci utama yang mengubah potensi individu menjadi prestasi organisasi. Hal ini menegaskan bahwa profesionalisme di tingkat desa tidak lagi ditentukan oleh latar belakang pendidikan semata, melainkan oleh komitmen, adaptabilitas, dan integritas perangkat desa dalam melayani kebutuhan publik secara cepat dan tepat.

REFERENSI

Fauzan. (2023). *Perilaku organisasi* (S. Farizi (ed.); 1st ed.). UIN KHAS Press (Anggota IKAPI).

Goo, E. E. kutu, & Sanda, E. M. (2022). ANALISIS PELAKSANAAN TATA KELOLA

RENCANA STRATEGIS, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DANA DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Journal Accounting Unipa*, 1.

Helida, N., Hariana, P., Novyanti, C., & Rizky, R. N. (2025). *Efektivitas Kinerja Organisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pemerintah desa merupakan garda terdepan yang paling dekat dengan masyarakat* ,. 14(1).

Kardina, M., Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2024). Penilaian Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Di Indonesia. *Jurnal Professional*, 11(2), 615–620.

Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo*. 3(2), 92–107.

Pratolo, S. (2008). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERWUJUDAN KEADILAN DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH: SUDUT PANDANG APARATUR DAN MASYARAKAT DI ERA OTONOMI DAERAH. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 9(2), 108–124.

Prisanda, E., & Febrina, R. (2019). *Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikai Berbasis Aplikasi SISPEDAL Dalam Rangka Mewujudkan Good Village Governance*. 1(1), 154–170.

Rachmad, F., Alkadafi, M., & April, M. (2025). Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Desa : Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Sungai Pinang. *Jurnal Solma*, 14(3), 3233–3245.

Ramdhani, R., & Kholik, A. (2025). Analisis Tingkat Kepuasan Mahasiswa Berdasarkan Layanan Akademik Pada masa Covid-19 di Perguruan Tinggi Swasta Bogor. *Jurnal Tadbir Muwahid*.

Setiawati, R. (2019). *PENGA RUH RELIGIUSITAS , PROFESIONALISME DAN*

HUMAN CAPITAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN BMT AL AMIN GOMBONG DENGAN MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING Rina Setiawati Jurusan Manajemen , STIE Putra Bangsa Kebumen (rinasetiawatisetiawati@gmail.com) Abst. 1–8.

Sidiq, U., & Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF_DI_BIDANG_PENDIDIKAN.pdf)

Utami, S. F. (2017). Manifestasi Sistem Pemerintahan Otoriter dalam Novel Faraj Karya Radwa Ashour dan Novel Pulang Karya Leila S. Chudori. *Diwan: Jurnal Bahasa Dan Sanstra Arab*, 9, 660–673.

Yulanda, A., & Adnan, M. F. (2023). *Transformasi Digital : Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik Ditinjau dari Perspektif Administrasi Publik*. 1(3), 103–110.